

ABSTRAK

Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meda Kabupaten Sumedang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian air yang menjual produknya yaitu berupa air bersih. Namun dalam penerapan tarifnya, cenderung merugikan pelanggan. Tarif yang diterapkan PDAM Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang memakai pemakaian minimum 10 meter kubik. Artinya, meskipun pelanggan dalam sebulan memakai air PDAM 5, 6, atau 7 meter kubik maka pembayaran yang dibebankan kepada pelanggan tetap, yaitu 10 meter kubik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, Mengetahui dan mendeskripsikan praktek jual beli air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Meda; dan *kedua*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan praktek dan penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

Tarif adalah daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang. Sedangkan jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan.

Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan: *pertama*, praktek jual beli air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang adalah mengelola dan mendistribusikan produknya (air bersih), menerima pemasangan sambungan langganan baru, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menanggapi pengaduan dari konsumen, dan melayani pembayaran, sedangkan penentuan tarif air dan penggolongan pelanggan di atur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor:690/KEP.510-HUK/2015 tanggal 30 Desember 2015; dan *kedua*, penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumedang berdasarkan SK Bupati Sumedang Nomor: 690/KEP.510-HUK/2015 tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena mekanisme penentuan harga dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia (*hablum min an-nas*). Penulis menyarankan perlu adanya regulasi lebih lanjut dari pihak PDAM Kabupaten Sumedang dan juga pemerintah daerah dalam menerapkan tarif air. Mengingat masyarakat atau pelanggan banyak yang mengeluhkan dan merasa dirugikan oleh tarif air PDAM yang sekarang.